

## **Peran BUM Desa dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Support Program Ketahanan Pangan**

Acep Sopandi<sup>1</sup>, Mona Novita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>TAPM Kabupaten Tebo, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Yasni Bungo

### **I. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan evaluasi agar tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuannya. Program MBG adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini direncanakan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)<sup>1</sup>. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang menyediakan makanan bergizi secara gratis sekali sehari, dengan tujuan memenuhi sepertiga dari kebutuhan kalori harian individu<sup>2</sup>.

#### **1.2 Tujuan Program MBG<sup>3</sup>**

Program MBG bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia.
2. Mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*).
3. Mendorong pemberdayaan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.

#### **1.3 Sasaran Program MBG<sup>4</sup>**

1. Peserta didik  
Peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar (SD), dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan (SMP/SMA/SMK sederajat), pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita);
3. Ibu hamil; dan
4. Ibu menyusui.

### **II. Pelaksanaan Program MBG**

Pembagian makanan disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di masing-masing jenjang pendidikan<sup>5</sup>. Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun ke depan dengan target:

1. Tahun 2025: Menjangkau 40% penerima.
2. Tahun 2026: Menjangkau hingga 80%.

<sup>1</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/blog/kapan-program-makan-gratis-anak-sekolah-mulai-berlaku-cek-informasi-terbaru/?utm>

<sup>2</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/negara-negara-dengan-program-makan-bergizi-gratis?utm>

<sup>3</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/negara-negara-dengan-program-makan-bergizi-gratis?utm>

<sup>4</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce3219dkq15o?utm>

3. Tahun 2029: Mencakup 100% penerima.

## 2.1 Anggaran Program

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Namun, terdapat penyesuaian anggaran per porsi makanan dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 karena kondisi anggaran negara. Beberapa ahli gizi menyatakan bahwa dengan anggaran Rp10.000 per porsi, pemenuhan gizi yang optimal mungkin sulit dicapai, terutama di daerah dengan harga bahan pokok yang tinggi.

## 2.2 Kontroversi dan Tantangan

Beberapa isu yang muncul terkait program MBG antara lain:

1. Dugaan pungutan  
Terdapat laporan mengenai pungutan dalam pelaksanaan program ini. Namun, BGN menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya apapun<sup>6</sup>.
2. Keterlibatan UMKM  
Pemerintah mengajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi mitra dalam program ini tanpa dipungut biaya. Hal ini bertujuan memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan makanan bergizi<sup>7</sup>.

## 2.3 Metode penyajian

Beberapa pihak mengusulkan metode prasmanan sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Metode ini diharapkan dapat memberikan variasi makanan dan memenuhi kebutuhan gizi yang beragam<sup>8</sup>. Namun yang terpenting adalah model penyajian disesuaikan dengan sumber daya, prinsip keamanan pangan (higienis), dan efisien.

## III. Strategi Memanfaatkan Program MBG untuk Pemberdayaan Petani

### 2.1 Negara-negara yang Melaksanakan Program MBG

Berdasarkan laporan *The State of School Feeding Worldwide 2022* dari *World Food Programme* (WFP), mayoritas negara di berbagai kawasan dunia telah mengimplementasikan program makan gratis. Pada tahun 2022, setidaknya terdapat 53 negara di kawasan Eropa-Asia Tengah yang memiliki kebijakan makan bergizi gratis. Selain itu, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatatkan 44 negara yang juga menerapkan kebijakan serupa.

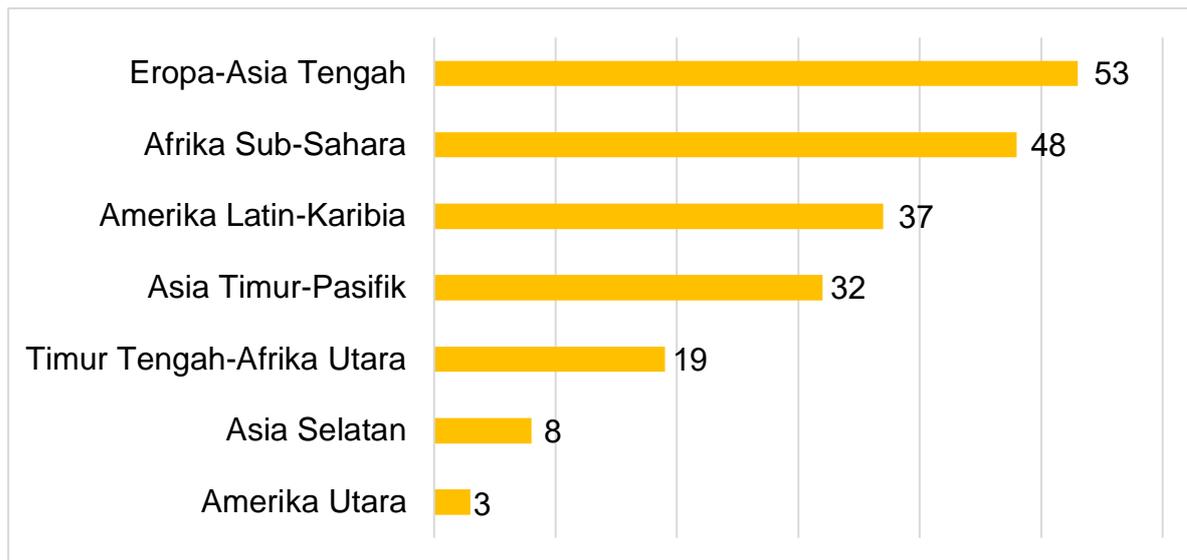
Di kawasan Amerika Latin-Karibia, terdapat 37 negara yang memiliki kebijakan makan bergizi gratis, sementara di kawasan Asia Timur-Pasifik terdapat 32 negara yang melaksanakan program ini. Kawasan Timur Tengah-Afrika Utara diikuti dengan 19 negara yang mengadopsi kebijakan serupa. Sementara itu, Asia Selatan tercatat memiliki 8 negara yang menerapkan kebijakan ini, dan Amerika Utara memiliki 3 negara. Secara keseluruhan, pada tahun 2022, ada 79 negara yang memiliki kebijakan *school feeding* di

<sup>6</sup> <https://money.kompas.com/read/2024/12/24/144441826/viral-dugaan-pungutan-bgn-pastikan-program-mbg-sepenuhnya-gratis?utm>

<sup>7</sup> <https://rilis.id/Nasional/Berita/Pemerintah-Ajak-UMKM-Jadi-Mitra-Program-Makan-Bergizi-Gratis-Tak-Dipungut-Biaya-Begini-Cara-Mendaftarnya-YfOesKr?utm>

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/5841053/program-makan-bergizi-gratis-dengan-metode-prasmanan-solusi-untuk-generasi-sehat?utm>

tingkat nasional, meskipun implementasinya belum sepenuhnya dilakukan di semua negara tersebut.



**Gambar: Jumlah Negara dengan Kebijakan MBG**

## 2.2 Potensi dan Ilustrasi Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menarik perhatian banyak pihak, terutama karena alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan rincian sebesar Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Sebagian pihak melihatnya hanya sebagai peluang proyek, sedangkan yang lain menganggapnya sulit diwujudkan karena alokasi Rp10.000 per anak dinilai tidak mencukupi atau tidak rasional.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu dengan strategi pemberdayaan terintegrasi dan berkelanjutan di desa, program ini menjadi sebuah potensi besar yang mampu menggerakkan perekonomian multi sektor. Adanya program makan bergizi gratis akan memunculkan kebutuhan besar terhadap bahan pangan bergizi. Permintaan hasil pertanian di desa akan meningkat secara signifikan, diikuti dengan perputaran uang yang lebih besar di wilayah pedesaan.

### Ilustrasi Perhitungan di satu Desa (Estimasi Rendah)

No.	Kelompok Sasaran	Jumlah	Anggaran (Rp.)
1	Ibu Hamil	10	100.000
2	Ibu Menyusui	14	140.000
3	Balita	70	700.000
4	Peserta Didik		-
	a. PAUD	60	600.000
	b. SD	200	2.000.000
<b>Total (dalam 1 hari)</b>		<b>354</b>	<b>3.540.000</b>
<b>Dalam 1 Minggu</b>			<b>21.240.000</b>
<b>Dalam 1 Bulan</b>			<b>84.960.000</b>
<b>Dalam 1 Tahun</b>			<b>1.019.520.000</b>

**Keterangan:** Angka-angka tersebut adalah estimasi dengan perhitungan terkecil. Di mana dalam satu desa jumlah penduduknya terbilang sedikit dan hanya memiliki satuan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD).

**Ilustrasi Perhitungan di satu Desa (Estimasi Menengah – Tinggi)**

No.	Kelompok Sasaran	Jumlah	Anggaran
1	Ibu Hamil	20	200.000
2	Ibu Menyusui	25	250.000
3	Balita	100	1.000.000
4	Peserta Didik		-
	a. PAUD	100	1.000.000
	b. SD	300	3.000.000
	c. SMP	300	3.000.000
	d. SMA	500	5.000.000
	e. Pesantren	150	1.500.000
<b>Total (dalam 1 hari)</b>		<b>1.495</b>	<b>14.950.000</b>
<b>Dalam 1 Minggu</b>			<b>89.700.000</b>
<b>Dalam 1 Bulan</b>			<b>358.800.000</b>
<b>Dalam 1 Tahun</b>			<b>4.305.600.000</b>

Bisa dibayangkan, jika disuatu desa memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki satuan pendidikan yang lengkap dan dengan jumlah siswa yang besar pula, maka perhitungannya akan semakin besar. Sejumlah dana (estimasi) tersebut akan berputar di desa, menciptakan pergerakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat setempat. Program ini juga dapat memberikan kepastian pasar bagi petani lokal. Selain itu, alokasi Rp10.000 per anak mengharuskan penyedia bahan pangan berasal dari wilayah setempat, karena pola berbasis "estate" atau melibatkan perantara (*broker*) tidak akan memungkinkan biaya tersebut tercapai.

**2.3 Peran BUM Desa dalam Pengelolaan Program MBG**

Menyambut program strategis nasional MBG, perlu mempersiapkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai pemasok bahan pangan segar dan olahan untuk Program MBG. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan: **Langkah-langkah Mempersiapkan BUM Desa sebagai Pengelola Program MBG**

No.	Aspek	Langkah-Langkah	Tujuan
1	Analisis Potensi dan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi sumber daya desa (petani, peternak, UMKM).</li> <li>• Pemetaan jenis produk pangan segar dan olahan yang dapat dihasilkan.[</li> <li>• Analisis kebutuhan Program MBG dengan menghitung jumlah pemanfaat di tiap sasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui potensi desa untuk mendukung program.</li> <li>• Memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan.</li> <li>• Menyesuaikan produksi dengan target program.</li> </ul>



No.	Aspek	Langkah-Langkah	Tujuan
2	Penguatan Kapasitas BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan legalitas dan struktur organisasi BUM Desa (berbadan hukum dan usaha yang sesuai dengan KBLI serta memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).</li> <li>Daftarkan produk/jasa ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibantu oleh Dinas PMD dan OPD Teknis lainnya.</li> <li>Pelatihan pengelolaan, produksi, dan standar keamanan pangan.</li> <li>Jalin kerja sama dengan pelaku usaha, koperasi, komunitas (masyarakat), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dasar hukum dan struktur yang jelas untuk melaksanakan program.</li> <li>Memberikan keabsahan BUM Desa secara hukum sebagai pelaksana (pengadaan barang/jasa) program MBG.</li> <li>Meningkatkan kompetensi pengelola.</li> <li>Memperluas jaringan dan sumber daya pendukung dengan mengutamakan mitra kerja lokal terutama pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>
3	Penyediaan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangun fasilitas seperti <i>cold storage</i>, dapur produksi, dan transportasi.</li> <li>Terapkan teknologi pertanian dan pengolahan modern (jika memungkinkan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kualitas produk dari produksi hingga distribusi.</li> <li>Meningkatkan hasil panen dan kualitas produk.</li> </ul>
4	Penyusunan Model Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangun rantai pasok terintegrasi dari petani hingga distribusi.</li> <li>Tentukan harga kompetitif sesuai anggaran Program MBG.</li> <li>Tetapkan mekanisme pembayaran dengan pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan distribusi berjalan lancar dan efisien.</li> <li>Menjamin harga terjangkau tanpa merugikan BUM Desa.</li> <li>Menjamin kelancaran transaksi dan pemasukan.</li> </ul>
5	Peningkatan Kapasitas Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan skala produksi untuk memenuhi kebutuhan program.</li> <li>Kelola stok dengan sistem manajemen yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan suplai bahan pangan mencukupi.</li> <li>Mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan bahan pangan.</li> </ul>
6	Jaminan Mutu dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajukan sertifikasi keamanan pangan dari BPOM atau lembaga terkait.</li> <li>Buat tim kontrol kualitas (bisa membentuk dan menguatkan kader keamanan pangan desa, kerja sama dengan BPOM Provinsi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi standar keamanan pangan dan meningkatkan kepercayaan.</li> <li>Memastikan produk sesuai standar gizi dan kebersihan.</li> </ul>



No.	Aspek	Langkah-Langkah	Tujuan
7	Pemasaran dan <i>Branding</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat merek dan logo produk BUM Desa.</li> <li>• Publikasikan dan Promosikan melalui media lokal dan acara desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat.</li> <li>• Memperluas informasi tentang peran BUM Desa dalam program.</li> </ul>
8	Pengawasan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring rutin proses produksi dan distribusi.</li> <li>• Lakukan evaluasi berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga konsistensi dan kualitas produk.</li> <li>• Mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan.</li> </ul>
9	Advokasi dan Lobi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapkan proposal kerja sama dengan pemerintah.</li> <li>• Diskusikan peran BUM Desa dalam forum kabupaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan dukungan resmi untuk peran BUM Desa dalam Program MBG.</li> <li>• Mengintegrasikan peran BUM Desa dalam kebijakan program.</li> </ul>
10	Kolaborasi dengan Pihak Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libatkan CSR atau swasta dalam penyediaan teknologi atau pendanaan.</li> <li>• Koordinasi dengan sekolah untuk memastikan distribusi berjalan lancar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat sumber daya dan pendanaan.</li> <li>• Memastikan bahan pangan sampai kepada penerima program sesuai rencana.</li> </ul>

**Catatan:**

Langkah-langkah tersebut dapat disederhanakan sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

**2.4 Integrasi Program MBG dan Program Ketahanan Pangan Desa**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan<sup>9</sup>. Peluang besar saat ini, di mana desa memiliki sumber daya keuangan untuk menopang program tersebut melalui alokasi Dana Desa (DD) sebesar 20% untuk ketahanan pangan, maka pengembangan strategi berbasis desa menjadi sangat relevan.

Penggunaan Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal serta mendorong kerja sama antara Desa maupun antarDesa, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Selain itu, alokasi DD untuk ketahanan pangan juga dapat diarahkan untuk mendukung swasembada pangan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat Desa. Implementasi ini melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), BUM Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya di Desa. Semua pelaksanaan program

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

ini harus sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan melalui keputusan dalam Musyawarah Desa<sup>10</sup>.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 mengamanahkan bahwa, penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Desa melibatkan berbagai pihak, yaitu Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa, dan kemitraan dengan pihak eksternal.

Pertama, **Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa** berperan dalam aspek penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa. Mereka menjadi motor penggerak dalam mengatur dan memastikan keberlangsungan program Ketahanan Pangan di tingkat lokal.

Kedua, **BUM Desa/BUM Desa bersama** memainkan peran penting dalam mendukung Ketahanan Pangan dengan berbagai kegiatan, seperti:

1. Mengelola usaha atau unit usaha lumbung pangan Desa.
2. Menyediakan permodalan untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
3. Menyediakan layanan penyewaan peralatan pertanian.
4. Mengelola sarana produksi serta pemasaran hasil pertanian melalui lumbung pangan, pengolahan, dan kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa maupun pihak swasta.

Ketiga, **masyarakat Desa** juga berperan aktif dalam mendukung swasembada pangan dan program makan bergizi gratis melalui:

1. Intensifikasi lahan milik masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan keluarga.
2. Partisipasi aktif dalam mewujudkan program Ketahanan Pangan di Desa.
3. Pengelolaan stok pangan untuk kebutuhan keluarga.

Keempat, **kemitraan** menjadi elemen strategis dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dengan melibatkan Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan media. Kemitraan ini diwujudkan melalui:

1. Pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan kepada Desa untuk mencapai Ketahanan Pangan.
2. Penyediaan informasi terkait akses permodalan guna mendukung swasembada pangan, pengolahan hasil produksi, promosi, dan kerja sama sebagai bentuk penguatan Ketahanan Pangan di tingkat Desa.
3. Kolaborasi berbagai pihak ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem Ketahanan Pangan yang berkelanjutan dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

## **2.5 Strategi Implementasi Program MBG**

Program MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, program ini tidak hanya mendukung gizi anak-anak tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Berikut strategi implemtasi MBG yang didasarkan pada regulasi:

---

<sup>10</sup> Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

**1. Memperkuat Infrastruktur Pertanian dan Distribusi**

Desa dapat menggunakan sebagian alokasi dana desa untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti gudang penyimpanan, rumah produksi, dan fasilitas transportasi.

**2. Pendanaan Program Pertanian Komunitas**

Memberikan subsidi untuk benih, pupuk, dan pelatihan petani guna meningkatkan produktivitas hasil panen (strategi intensifikasi pertanian).

**3. Membangun Keterlibatan BUM Desa**

Sebagai *offtaker* hasil pertanian, BUM Desa dapat mendistribusikan bahan pangan langsung ke dapur-dapur penyelenggara MBG.

**4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Desa dapat menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola dapur, petani, dan pihak lain yang terlibat dalam program MBG. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen pangan, pengelolaan keuangan, hingga teknik pertanian modern. Dengan SDM yang lebih terampil, efektivitas program akan semakin meningkat.

**5. Pengelolaan Lahan Tidur dan Pekarangan**

Setiap rumah tangga diberdayakan untuk menanam sayuran, beternak, atau mengelola pekarangan guna mendukung kebutuhan bahan pangan.

**6. Melibatkan Sekolah Berbasis Asrama atau Pesantren**

Sekolah asrama atau pesantren dapat menjadi pusat produksi pangan yang melibatkan siswa dan memanfaatkan lahan sekolah.

Dengan kombinasi strategi ini, program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak dan sasaran lainnya, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program ini dapat menciptakan siklus ekonomi lokal yang berkelanjutan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa, serta memperkuat posisi desa sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.